Kunjungan Desa di Hulu Malinau Maret 2002

Kabar dari

TIM PENGELOLAAN HUTAN

BERSAMA

HULU SUNGAI MALINAU

No. 8, Juli 2002

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik,

Inilah kesimpulan pengamatan perkembangan 27 desa di hulu Sungai Malinau selama Desember 2001 - Maret 2002.

Sejak Tim Pendamping Pengelolaan Hutan Bersama mulai kegiatannya (tahun 2000) di daerah hulu Sungai Malinau sekitar setiap enam bulan sekali tim pendamping berkunjung ke semua desa sepanjang Sungai Malinau. Kunjungan dimaksud untuk melihat perkembangan di desa-desa terutama berkaitan dengan pengelolaan hutan dan kerjasama antar pihak dalam pemanfaatan hutan. Informasi ini bermanfaat untuk mengamati kecenderungan dalam pola pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya alam. Sekaligus menggambarkan kondisi mana mendukung berbagai pihak (terutama masyarakat, Pemerintah daerah dan swasta) bekerja sama yang dianggap saling menguntungkan.





Pada kunjungan kali ini (bulan Maret 2002) ada beberapa pengamatan yang ingin kami bagikan dengan masyarakat hulu Sungai Malinau untuk menjadi bahan masukan kita semua dalam memikirkan pengembangan pengelolaan hutan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas serta tetap lestari.

Sebagai dampak positif kegiatan IPK di sebagian desa terlihat bahwa permasalahan antar desa sementara ini berkurang. Tapi di sisi lain di sebagian desa malah hubungan antar masyarakat dalam satu desa semakin tidak harmonis. Ini disebabkan perasaan masyarakat bahwa proses pembagian keuntungan dari IPK kurang terbuka, sehingga timbul kekhawatiran bahwa pembagian tidak merata dan adil. Kecenderungan ini dapat berakibat bahwa pengelolaan hutan akan semakin sulit diatur karena kurangnya persatuan dan kerjasama antar masyarakat. Kalau kekompakan di dalam desa kurang bagaimana kita mau berunding dengan pihak lain??

Ada beberapa konflik tentang wilayah desa dan batas desa yang masih dibahas namun perundingan dilakukan tanpa menimbulkan suasana panas dan juga lebih sering diusahakan untuk melibatkan pihak lain. Masyarakat khususnya mengharap keterlibatan pemerintah (Camat atau PemKab) untuk membantu agar tercapai kesepakatan (Sentaban - Setulang, Batu Kajang - Gong Solok, Metut - Tanjung Nanga, Metut - Pelancau, Laban Nyarit - Halanga, Nunuk Tanah Kibang - Long Rat).

Sebagian permasalahan tentang batas desa selama ini tidak muncul walaupun salah satu pihak tidak puas sebab menganggap kesepakatan yang ada tidak adil. Karena salah satu pihak merasa tidak berdaya mereka tidak tahu bagaimana mengangkat permasalahan ini untuk mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kiranya perlu dipikirkan bagaimana proses perundingan dapat dilanjutkan. Sebagai langkah pertama pada lokakarya "Membangun Agenda Bersama III" wakil-wakil masyarakat mengatakan perlu dilanjutkan perundingan untuk mencari kesepakatan tentang letak batas.

Dikhawatirkan bahwa kalau belum memperoleh kesepakatan pada suata saat nanti permasalahan akan muncul kembali.

Kegiatan oleh perusahaan IPK selama ini bisa berlangsung lancar asal perusahaan secara berkala memberikan keuntungan kepada masyarakat (terutama dalam bentuk uang) yang dirasakan oleh seluruh masyarakat; misalnya C.V. Gading Indah (Setarap), C.V. Wana Bakti (Adiu), P.T. Trisetia Abadi Jaya (Sengayan), P.T. Nanga Jaya Bersama (Tanjung Nanga). Hanya kegiatan C.V. Hanura diprotes oleh masyarakat karena mereka kurang merasakan manfaat dari kegiatan C.V. Hanura di wilayah desa Langap.

Dengan adanya pembagian fee oleh IPK terlihat peredaran uang di desa-desa cukup besar. Namun belum jelas berapa banyak dari uang fee digunakan untuk membeli barang mewah (seperti televisi dan CD) dan berapa banyak digunakan untuk keperluan dasar atau jangka panjang (misalnya untuk pendidikan anak, atau pelayanan kesehatan).

Seperti disebut di atas ada kecenderungan di masyarakat bahwa persatuan dan kerjasama semakin berkurang. Di tingkat Kabupaten dalam waktu singkat terbentuk beberapa organisasi baru. Pembentukan organisasi baru dapat bermanfaat apabila berfungsi sebagai jembatan antar masyarakat dengan PemKab dan pihak lain. Tetapi kalau organisasi-organisasi terbentuk untuk mencari dukungan pada kepentingan tertentu (baik perorangan atau per kelompok kecil) maka tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik baru di dalam masyarakat.

****



Apakah CIFOR?

CIFOR adalah lembaga penelitian internasional independen yang dibentuk pada tahun 1993 sebagai tanggapan terhadap kepedulian global akan konsekuensi-konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomis dari kerusakan hutan. *CIFOR* menghasilkan dan mendorong alih pilihan-pilihan kebijakan dan teknologi yang berdasarkan ilmu pengetahuan untuk pengelolaan hutan lestari. CIFOR bukan perusahaan, dan bukan instansi pemerintah. CIFOR salah satu jenis lembaga penelitian.

Apa Tujuan CIFOR?

- Meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagai pengelola hutan.
- Meningkatkan produktivitas dan kelestarian sistem hutan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Memahami hubungan timbal balik antara lingkungan biologis, fisik, sosial dan ekonomi di dalam sistem hutan dan kehutanan.
- Menyediakan analisis, informasi dan saran-saran untuk pengambilan keputusan di bidang hutan dan tata guna hutan.
- Meningkatkan kemampuan penelitian nasional.

CIFOR bisa dihubungi di lapangan di Desa Long Loreh dan Stasiun Seturan.

Atau di Bogor:
Jl. CIFOR, Situgede
Sindang Barang
Bogor 16680
Telp. (0251) 622-622
Fax. (0251) 622-100

Atau lewat surat:
CIFOR
PO Box 6596 JKPWB
Jakarta 10065

****